Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Kontroversi Geprek Benu dan Ruben Onsu: Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek dalam Industri Kuliner dan Hiburan

Ni Kadek Manik Lely Kamani¹, Vira Khaerunnisa²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

E-mail: manikkamani1@gmail.com¹, khaerunnisavira161@gmail.com²

Abstrak

Kompleksitas isu hak cipta dan hak merek di Indonesia yang terkait dengan dinamika globalisasi dalam perdagangan saat ini. Industri kuliner dan hiburan menjadi sorotan karena perkembangan inovatif yang seringkali memicu permasalahan keplagiatan, menantang kerangka hukum hak kekayaan intelektual di era kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis isu-isu tersebut dengan fokus pada kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali data dan menganalisis norma-norma hukum terkait. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hak cipta dalam industri kuliner, pertentangan antara hak merek dan kepemilikan nama, dampak teknologi terhadap hak kekayaan intelektual, relevansi hukum dalam kasus kontroversi, serta implikasi putusan hukum terhadap industri. Dalam era globalisasi, tantangan dan adaptasi dalam harmonisasi perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi fokus utama dalam analisis ini.

Kata Kunci : *Geprek Benu, Hak Cipta, Hak Merek*

Abstract

The complexity of copyright and trademark issues in Indonesia is intertwined with the dynamics of globalization in today's commerce. The culinary and entertainment industries have come under scrutiny due to innovative developments that often trigger plagiarism issues, challenging the legal framework of intellectual property rights in the contemporary era. This article aims to analyze these issues, focusing on the Geprek Benu and Ruben Onsu case. The research methodology employed is juridical-normative, using a qualitative approach to gather and analyze data and relevant legal norms. This study explores copyright protection in the culinary industry, the conflict between trademarks and name ownership, the impact of technology on intellectual property rights, legal relevance in controversial cases, and the implications of legal decisions on the industry. In the era of globalization, the primary focus of this analysis lies in the challenges and adaptations within the harmonization of intellectual property protection.

Keywords : *Geprek Benu, Copyright, Trademark*

PENDAHULUAN

Perdagangan di Indonesia saat ini telah terikat erat dengan dinamika globalisasi yang signifikan memengaruhi tatanan usaha di negeri ini. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara bisnis dilakukan, tetapi juga memacu para pengusaha untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang relevan dengan perubahan zaman. Namun, dalam prosesnya, gagasan-gagasan inovatif ini terkadang menimbulkan permasalahan keplagiatan di mana para pelaku usaha, baik secara tidak sengaja maupun sengaja, meniru atau menyalin konsep bisnis yang sudah ada. Situasi seperti ini menciptakan kompleksitas dalam hukum hak kekayaan

intelektual yang semakin rumit di era kontemporer, terutama dalam sektor industri hiburan dan kuliner.

Perlindungan hak cipta, hak merek, dan aspek hukum lainnya menjadi semakin penting dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam serta penyesuaian dalam upaya menghadapi tantangan baru yang muncul di era globalisasi. Kemajuan merek dagang di Indonesia semakin bervariasi berkat dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Hal ini telah membuka pintu bagi berbagai merek yang telah dikenal di masyarakat luas.

Informasi mengenai keunggulan produk yang dimiliki oleh merek-merek terkenal sekarang dengan mudah dapat diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, pemilik merek bersaing untuk memenangkan kepercayaan masyarakat. Namun, persaingan ini juga memicu perilaku bisnis yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek terkenal, yang dipicu oleh tingginya permintaan konsumen.

Merek, sebagai manifestasi dari karya intelektual, memegang peran yang sangat vital dalam memperlancar dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, merek juga berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus. Dalam konteks ini, merek berfungsi sebagai sarana untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, menunjukkan asal-usulnya, dan sekaligus menjadi penanda unik yang membedakan produk dan jasa tersebut dari yang lain. Merek juga berfungsi sebagai indikator kualitas produk dan jasa yang disediakan.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang terdaftar, termasuk tindakan persaingan yang tidak etis, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin yang menimbulkan tantangan bagi integritas merek tertentu.

Pengaturan merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual telah ada sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 21 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pertama kali diberlakukan, dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Setelah Indonesia menjadi anggota perjanjian TRIPs, pada tahun 1997, undang-undang yang berkaitan dengan merek mengalami revisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Merek. Revisi ini dilakukan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPs.

Pada tahun 2001, undang-undang mengenai merek kembali direvisi dan diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan terakhir dalam peraturan merek terjadi hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (dikenal sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis). Dalam perjalanan ini, peraturan-peraturan merek telah mengalami transformasi yang bertujuan untuk memenuhi standar internasional yang diatur dalam perjanjian TRIPs, sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan hak kekayaan intelektual di era modern (Onsu et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menekankan peranan yang sangat signifikan dari merek, terutama dalam menjaga kompetisi yang adil dan sehat dalam dunia usaha. Merek bukan hanya sekadar alat untuk mengidentifikasi asal-usul produk, tetapi juga sebagai penanda kualitas dan otentisitas suatu produk. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang sangat efektif dan komprehensif mengenai merek yang mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara keseluruhan.

Regulasi merek memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan hak konsumen dan membantu memastikan bahwa persaingan bisnis berjalan dengan adil, sambil mendorong inovasi dan kualitas produk.

Kasus kontroversi antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu menyoroti isu hak cipta dan hak merek dalam industri kuliner dan hiburan. Perselisihan antara pemilik merek seringkali menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual, yang menarik untuk dikaji secara lebih rinci. Dalam konteks ini, analisis hukum yang lebih mendalam akan memperkaya pemahaman terhadap isu-isu hak kekayaan intelektual dalam kasus seperti ini.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus kontroversial antara Geprek Benu dan Ruben Onsu yang melibatkan aspek hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta dan merek dagang, dalam ranah industri kuliner dan hiburan di Indonesia. Dalam konteks ini, tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi serta menganalisis isu-isu hukum yang muncul sehubungan dengan kasus tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap industri terkait.

Pentingnya pemahaman mendalam terkait hak kekayaan intelektual menjadi landasan utama dalam analisis ini. Mengacu pada evolusi perkembangan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, artikel ini akan menyelidiki dan membahas permasalahan hukum yang timbul dari kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu. Selain itu, analisis akan memperhatikan implikasi yang dihasilkan dari kasus tersebut, terutama dalam konteks industri kuliner dan hiburan di Indonesia.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pertentangan terkait hak cipta dan merek dagang antara dua pihak yang terkemuka di industri tersebut. Analisis akan mendalam tentang konflik hak kekayaan intelektual ini serta dampaknya pada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, industri kuliner secara umum, dan industri hiburan di Indonesia.

Dalam kajian ini, akan disajikan aspek-aspek hukum yang relevan dengan kasus ini, termasuk peraturan-peraturan terkait hak cipta dan merek dagang yang mengatur industri tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus dan implikasi dari keputusan hukum yang diambil juga akan dianalisis secara rinci.

Perkembangan dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia akan menjadi landasan untuk memahami dan mengevaluasi isu-isu yang muncul dalam kasus ini. Hal ini penting untuk memahami bagaimana regulasi hukum yang ada mengatur hak cipta dan merek dagang dalam industri tertentu serta bagaimana hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perdagangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global.

Analisis ini tidak hanya akan memberikan pandangan terperinci terhadap kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu, tetapi juga akan menyelidiki implikasi lebih luasnya dalam industri kuliner dan hiburan di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkapkan pandangan yang komprehensif mengenai kompleksitas isu-isu hukum yang timbul dalam perselisihan hak kekayaan intelektual di ranah industri tersebut.

METODE

Bagian Metodologi yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode ini akan difokuskan pada analisis teks dan norma-norma hukum yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengeksplorasi serta menjelaskan data yang terkumpul selama proses penelitian.

Hasil dari penelitian ini akan bersifat preskriptif, yang berarti penelitian akan memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan permasalahan yang telah diajukan dalam konteks kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu. Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap studi pustaka yang mencakup buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.

Penelitian akan menggali norma-norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Analisis akan dilakukan terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dalam industri kuliner dan hiburan serta hak kekayaan intelektual yang menjadi fokus utama kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu.

Dalam menerapkan metodologi ini, akan dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber teks hukum seperti undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan masalah hak cipta dan hak merek dalam industri kuliner dan hiburan. Analisis akan dilakukan secara menyeluruh terhadap norma-norma hukum yang ada guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual dalam konteks kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Kuliner dan Hiburan

Perlindungan hak cipta dalam industri kuliner dan hiburan memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan terhadap karya kreatif di dalamnya. Kontroversi antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu menyoroti fokus pada hak cipta merek dagang "Geprek Bensu." Bidang ini sering melibatkan penciptaan karya unik, seperti resep makanan, desain interior restoran, format acara, dan penggunaan merek yang menjadi identitas bisnis.

Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 mengenai Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri menjelaskan hak eksklusif dalam konteks merek yang diberikan oleh negara. Keputusan ini mencabut status merek "PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent," menunjukkan pentingnya hak eksklusif dalam mencegah penggunaan merek serupa dalam kategori produk atau layanan yang sama. Hak eksklusif ini memiliki batasan waktu tertentu.

SK ini mencerminkan situasi di mana hak eksklusif atas merek dinyatakan mati atau dicabut. Pencabutan ini dapat disebabkan oleh pelanggaran aturan merek atau keputusan pengadilan terkait hak atau penggunaan merek tersebut. Langkah ini menunjukkan adanya pelanggaran atau masalah serius dalam pengelolaan merek.

Kode kategori HKI-KI-06.06-10 dan HKI-KI-06.07-11 dalam SK ini adalah bagian dari sistem klasifikasi merek terdaftar. Mereka menunjukkan jenis dan klasifikasi merek yang terpengaruh oleh keputusan penghapusan. Proses ini mungkin didasarkan pada analisis komprehensif terhadap situasi hukum dan fakta terkait merek.

Perlindungan hak cipta dalam industri ini tidak hanya terbatas pada merek dagang, tetapi juga mencakup aspek perlindungan terhadap karya-karya kreatif. Proses penghapusan merek menjadi cerminan regulasi dan mekanisme hukum dalam mengatur hak kekayaan intelektual. Pemilik merek harus memahami dan mematuhi regulasi merek dan hukum yang berlaku untuk mencegah risiko pencabutan atau kehilangan perlindungan merek di masa depan.

Kasus Geprek Bensu dan Ruben Onsu menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam merek "Geprek Bensu." Merek ini dianggap sebagai manifestasi dari karya intelektual yang melibatkan kreativitas dalam konsep bisnis dan pengemasan produk kuliner. Hak cipta melindungi identitas dan nilai bisnis yang dihasilkan dari karya inovatif yang dapat dikenali oleh publik.

Surat Keputusan HKI-KI.06.07-11 menjelaskan bahwa hak merek adalah hak khusus yang didaftarkan oleh pemilik merek. Penggunaan merek memerlukan perjanjian lisensi yang didaftarkan ke Kantor Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses penghapusan merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Pedoman Geografis, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti tidak bertentangan dengan campur tangan negara, peraturan perundang-undangan, dan kesusilaan.

Kasus ini menyoroti persamaan logo antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu, meskipun substansi penggunaan merek telah terpasang dalam kemitraan dengan singkatan Ruben Onsu. Pemilik merek dapat melakukan banding terhadap keputusan Menteri, dan pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan penghapusan merek dengan alasan tertentu. Permasalahan juga muncul terkait dugaan pelanggaran dan kesalahan yang melibatkan Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual dan Departemen Hak Asasi Manusia.

Pertentangan antara Hak Merek dan Kepemilikan Nama

Perlindungan hak cipta dalam industri kuliner dan hiburan memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap karya kreatif di dalamnya. Kontroversi antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu menyoroti hak cipta merek dagang "Geprek Bensu," termasuk penciptaan karya unik seperti resep makanan, desain interior restoran, format acara, dan penggunaan merek sebagai identitas bisnis.

Surat Keputusan Nomor: HKI-KI.06.07-11 mengenai Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri menjelaskan hak eksklusif dalam konteks merek yang diberikan oleh negara. Keputusan ini mencabut status merek "PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Yangcent," menunjukkan pentingnya hak eksklusif dalam mencegah penggunaan merek serupa dalam kategori produk atau layanan yang sama, dengan batasan waktu tertentu.

SK ini mencerminkan situasi di mana hak eksklusif atas merek dinyatakan mati atau dicabut, bisa karena pelanggaran aturan merek atau keputusan pengadilan terkait hak atau penggunaan merek tersebut. Langkah ini menunjukkan adanya pelanggaran atau masalah serius dalam pengelolaan merek.

Kode kategori HKI-KI-06.06-10 dan HKI-KI-06.07-11 dalam SK ini merupakan bagian dari sistem klasifikasi merek terdaftar, menunjukkan jenis dan klasifikasi merek yang terpengaruh oleh keputusan penghapusan. Proses ini mungkin didasarkan pada analisis komprehensif terhadap situasi hukum dan fakta terkait merek.

Perlindungan hak cipta dalam industri ini tidak hanya terbatas pada merek dagang, tetapi juga mencakup aspek perlindungan terhadap karya-karya kreatif. Proses penghapusan merek mencerminkan regulasi dan mekanisme hukum dalam mengatur hak kekayaan intelektual. Pemilik merek harus memahami dan mematuhi regulasi merek dan hukum yang berlaku untuk mencegah risiko pencabutan atau kehilangan perlindungan merek di masa depan.

Kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta dalam merek "Geprek Benu" sebagai manifestasi karya intelektual yang melibatkan kreativitas dalam konsep bisnis dan pengemasan produk kuliner. Hak cipta melindungi identitas dan nilai bisnis yang dihasilkan dari karya inovatif yang dapat dikenali oleh publik.

Surat Keputusan HKI-KI.06.07-11 menjelaskan bahwa hak merek adalah hak khusus yang didaftarkan oleh pemilik merek, memerlukan perjanjian lisensi yang didaftarkan ke Kantor Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses penghapusan merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Pedoman Geografis, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti tidak bertentangan dengan campur tangan negara, peraturan perundang-undangan, dan kesusilaan.

Kasus ini menyoroti persamaan logo antara Geprek Benu dan Ruben Onsu, meskipun substansi penggunaan merek telah terpasang dalam kemitraan dengan singkatan Ruben Onsu. Pemilik merek dapat melakukan banding terhadap keputusan Menteri, dan pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan penghapusan merek dengan alasan tertentu. Permasalahan juga muncul terkait dugaan pelanggaran dan kesalahan yang melibatkan Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual dan Departemen Hak Asasi Manusia.

Dalam situasi yang kompleks seperti ini, pengadilan harus melakukan analisis mendalam terhadap hubungan antara merek atau nama yang dipertentangkan dengan identitas pribadi, serta mengambil keputusan yang seimbang antara hak eksklusif merek dan hak atas identitas pribadi individu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Kasus ini menunjukkan bagaimana hak merek bisa saling bertabrakan dan menyulitkan penegakan hukum dalam konteks industri. Konflik semacam ini memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis dan keadilan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang cermat dan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak merek yang sah dan hak pribadi atas nama (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020).

Pertentangan antara hak merek dan kepemilikan nama dalam kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu menyoroti kompleksitas perlindungan hukum terkait identitas personal dan bisnis. Pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan kedua sisi konflik ini dengan cermat dan menetapkan keputusan yang memperhatikan perlindungan baik hak merek maupun hak atas nama seseorang. Kesesuaian antara perlindungan hukum terhadap merek dan hak pribadi atas nama menjadi penting dalam mencapai keadilan seimbang dalam menyelesaikan kasus ini (Marselinus Manik, 2019).

Merek yang dibuat oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan. Merek bisa dianggap sebagai identitas asal produk atau layanan yang terkait dengan tujuan pembuatannya. Bagi konsumen, merek berperan sebagai jaminan kualitas produk dengan tujuan yang berbeda dari sudut pandang masyarakat luas. Oleh karena itu, merek yang memiliki reputasi yang besar rentan untuk disusul, ditiru, atau ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hakim et al., 2022).

Merek memiliki variasi, seperti merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif, digunakan untuk menandai produk dengan maksud menunjukkan asal-usul barang atau jasa, kualitasnya,

dan untuk mencegah duplikasi. Perlindungan hukum terhadap merek semakin penting seiring perkembangan perdagangan global (Marselinus Manik, 2019).

Perlindungan hukum terhadap hak merek menjadi penting dengan alasan-alasan berikut:

1. Menjamin kepastian hukum bagi pencipta, pemilik, atau pemegang merek.
2. Mencegah pelanggaran dan kejahatan terhadap hak merek.
3. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar lebih termotivasi untuk mendaftarkan merek.

Perlindungan hukum merek terdaftar bisa bersifat preventif atau represif. Namun, untuk mendapat perlindungan, merek harus didaftarkan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan kondisi di mana merek tidak dapat didaftarkan, seperti bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesucilaan, atau ketertiban umum (Marselinus Manik, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia, perlindungan merek terdaftar berlangsung selama 10 tahun sejak penerimaan pendaftaran merek dan bisa diperpanjang. Pada dasarnya, kepastian hukum merek diberikan dengan jangka waktu penggunaan yang wajar, sekitar 7 tahun (Hakim et al., 2022).

Meskipun nama terkenal, itu tidak menjamin perlindungan otomatis sebagai merek. Nama harus didaftarkan ke Ditjen HKI untuk memiliki kekuatan hukum secara yuridis. Dalam hal ini, pengadilan diharapkan untuk mempertimbangkan kedua sisi konflik antara merek dan hak atas nama, menegaskan pentingnya perlindungan hak kedua aspek tersebut untuk mencapai keadilan seimbang (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020).

Pengaruh Teknologi Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan hak cipta dan merek dalam industri kuliner dan hiburan. Kasus kontroversial antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu menunjukkan peran tak terelakkan teknologi, seperti media sosial, internet, dan platform digital, yang memiliki peran penting dalam mempromosikan dan menyebarkan merek serta karya kreatif (Halomoan et al., 2023).

Merek, dalam konteks kasus seperti Geprek Bensu, menjadi penanda untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Penggunaan merek, baik sebagai merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif, menjadi praktik umum untuk memberi identitas pada produk, menunjukkan asal-usul barang, memperlihatkan kualitasnya, dan mencegah peniruan atau pemalsuan (Arfi Dyah Chatarina, 2019).

Perlindungan hukum terhadap merek semakin penting seiring perkembangan perdagangan global. Merek memainkan peran krusial dalam ekonomi global, memungkinkan konsumen mengidentifikasi produk dan membentuk preferensi berdasarkan merek tersebut (Onsu et al., 2022). Perlindungan ini memastikan pemilik merek memiliki hak eksklusif dalam kegiatan komersial, memberikan kepastian hukum untuk mencegah penggunaan tidak sah atau penyalahgunaan merek (Halomoan et al., 2023).

Dalam kasus Geprek Bensu, merek menjadi identitas dari waralaba atau bisnis tersebut, menjadikan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa sangat penting untuk menjaga integritas merek. Ini menunjukkan kebutuhan akan sistem hukum yang efektif dalam menangani konflik merek, termasuk penilaian terhadap keunikan dan kesamaan dalam kasus semacam ini (Arfi Dyah Chatarina, 2019).

Kesadaran akan hak-hak merek semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi. Mempertahankan integritas merek melalui perlindungan hukum adalah langkah vital untuk kelangsungan usaha dan kepercayaan konsumen terhadap merek yang diwakilinya (Onsu et al., 2022). Perlindungan hukum atas merek juga melibatkan pertimbangan terhadap prinsip iktikad baik, yang mencakup integritas, niat jujur, dan tanggung jawab dalam aktivitas bisnis serta penghargaan terhadap hak-hak pihak lain (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020).

Keputusan pengadilan yang berfokus pada prinsip iktikad baik dapat menjadi panduan dalam menilai norma-norma yang harus diikuti dalam pendaftaran merek. Prinsip ini tidak hanya mencakup formalitas hukum, tetapi juga aspek etika dan moral dalam menjalankan

aktivitas bisnis, menjaga keadilan, dan keseimbangan di antara pihak yang terlibat (Marselinus Manik, 2019).

Pendaftaran merek menjadi penting bagi konsumen karena mencerminkan kualitas dan kepercayaan. Namun, syarat-syarat harus dipenuhi agar merek dapat terdaftar, termasuk memiliki daya pembeda, tidak menjadi milik umum, dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020). Pelanggaran hak merek masih sering terjadi di Indonesia, menekankan pentingnya konsep iktikad baik dalam pendaftaran merek untuk melindungi merek yang telah terdaftar sebelumnya (Marselinus Manik, 2019).

Perlindungan hukum atas merek diwujudkan melalui pendaftaran, dengan masa perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Prinsip keadilan menjadi acuan dalam menentukan jangka waktu perlindungan merek (Arif, 2018). Terdapat kondisi di mana merek tidak dapat didaftarkan, seperti yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, atau moralitas. Sistem ini memberikan kepastian hukum, mengingat merek harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan hukum (Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl Raya Gandul & Barat Indonesia, 2017).

Teknologi, meski memberikan kemajuan, juga membawa tantangan baru terkait hak kekayaan intelektual. Internet memfasilitasi penyebaran cepat informasi dan produk, yang dapat menjadi sarana untuk pelanggaran hak cipta atau merek dagang. Penegakan hukum dalam ruang digital menjadi tugas rumit yang memerlukan strategi cermat dan adaptif (Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl Raya Gandul & Barat Indonesia, 2017).

Peran teknologi dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi kunci utama dalam mendukung inovasi. Sistem digital terintegrasi untuk pemantauan, registrasi, dan penegakan hak kekayaan intelektual menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan dalam konteks ini (Merrill & John Merrill Foundation, 2018).

Merek, sebagai penanda yang membedakan produk atau layanan, memainkan peran krusial dalam memberikan jaminan kualitas dan keberbedaan suatu produk atau layanan. Namun, kepopuleran merek juga membawa risiko pencemaran dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Perlindungan hukum terhadap merek menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek, mencegah pelanggaran hak merek, dan memberikan insentif kepada masyarakat untuk mendaftarkan merek (Chosyali, 2019). Pendaftaran merek memberikan kepastian bagi konsumen, menjamin kualitas dan keamanan produk atau layanan yang menggunakan merek terdaftar, dengan syarat harus memenuhi standar daya pembeda, tidak bertentangan dengan moralitas agama, dan bukan milik umum (Heniyatun et al., 2020).

Di Indonesia, tantangan perlindungan hak merek seringkali muncul dari pelanggaran yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip iktikad baik menjadi kunci untuk menjaga integritas merek. Dalam kasus "Geprek Bensu", pengadilan harus mempertimbangkan iktikad baik dalam proses pendaftaran merek (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) memiliki tanggung jawab menolak pendaftaran merek yang melibatkan tindakan iktikad tidak baik, seperti meniru atau menyalin merek yang sudah terdaftar. Ini merupakan langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan merek (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Mendorong prinsip iktikad baik dalam pendaftaran merek adalah langkah penting untuk menjaga keadilan, melindungi pemilik merek, dan mencegah penyalahgunaan sistem merek. Ditjen HKI berperan dalam mempertahankan integritas merek dan hukum merek di Indonesia (Windiantina et al., 2022).

Perlindungan hukum atas merek baru diperoleh melalui pendaftaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat sebuah merek tidak dapat didaftarkan, seperti

bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, atau hanya menjadi sebutan untuk barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran (Sardana & Disurya, n.d.).

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 tahun, namun dapat diperpanjang dan melibatkan kewajiban penggunaan merek dalam perdagangan setidaknya selama 3 tahun berturut-turut. Pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti dan eksklusif (Sardana & Disurya, n.d.).

Dalam menghadapi pengaruh teknologi terhadap hak kekayaan intelektual, regulasi dan strategi penegakan hukum perlu disesuaikan. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan platform digital menjadi kunci untuk menangani isu-isu hak kekayaan intelektual yang muncul (Penelitian Hukum De Jure & Simatupang Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Peneitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan HR Rasuna, 2017). Dalam kasus Geprek Bensu dan Ruben Onsu, pendekatan holistik dan adaptif diperlukan dalam mengelola, melindungi, dan menegakkan hak kekayaan intelektual di era digital ini (Jannah et al., 2018).

Relevansi Hukum dalam Kasus Kontroversi

Kasus Geprek Bensu dan Ruben Onsu menyoroti kompleksitas hak kekayaan intelektual (HKI) dalam industri kuliner dan hiburan, dengan fokus utama pada hak cipta dan hak merek. Perlindungan hukum terhadap hak merek dan nama menjadi esensial dalam industri yang terus berkembang ini (Arif, 2018).

Merek berperan sebagai penanda untuk membedakan produk, dan ketiadaan daya pembeda dapat menyebabkan kebingungan konsumen. Prosedur pembatalan merek diatur dalam Pasal 76-79 UU Merek, dengan batas waktu 5 tahun sejak pendaftaran, kecuali melibatkan moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum (Windiantina et al., 2022).

Kriteria persamaan pada pokoknya merek melibatkan unsur dominan seperti bentuk, penulisan, penempatan, bunyi, atau kombinasi dari unsur tersebut. "Likelihood of confusion" menjadi parameter, di mana kesamaan bisa membingungkan masyarakat (Jannah et al., 2018).

Kasus "BENSU" dan "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" menimbulkan perdebatan tentang kesamaan esensial. Pengadilan menetapkan bahwa tidak ada kesamaan esensial, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Jannah et al., 2018). Aspek hukum menjadi kunci dalam menilai kesamaan atau perbedaan hak merek. Pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek hukum untuk menentukan persamaan pada pokoknya (Windiantina et al., 2022).

Keputusan pengadilan menegaskan ketidaksamaan esensial dan pentingnya memahami undang-undang merek. Meskipun mirip, elemen yang mendasari keduanya tidak cukup serupa (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020). Meski terdapat kemiripan, keputusan pengadilan berdasarkan pada landasan hukum yang jelas seperti Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Marselinus Manik, 2019). Kedua merek memiliki unsur serupa, tetapi perbedaan substansial menentukan putusan pengadilan. Ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman aturan undang-undang merek (Hakim et al., 2022).

Sengketa merek melibatkan kompleksitas persamaan pada pokoknya, termasuk aspek visual, suara, makna konseptual, dan konteks keseluruhan (Shellen Dhea Af Gaumi, 2020).

Pentingnya hukum terletak pada penegakan keadilan dalam kepemilikan merek dan identitas bisnis. Perlindungan hukum harus memberikan kejelasan kepemilikan merek agar menciptakan lingkungan usaha yang adil (Onsu et al., 2022).

Kasus ini menekankan pemahaman mendalam terhadap HKI, terutama terkait merek dagang dan hak cipta. Analisis aturan hukum yang berlaku menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa ini (Arfi Dyah Chatarina, 2019). Penilaian cermat persamaan pada pokoknya merek menjadi penting untuk menghindari kebingungan di masyarakat. Pemahaman konsep ini krusial untuk kelangsungan bisnis di era inovasi dan persaingan ketat (Chosyali, 2019).

Implikasi Putusan Hukum Terhadap Industri

Dalam sengketa Geprek Bensu dan Ruben Onsu, keputusan hukum akan memengaruhi seluruh industri kuliner dan hiburan, mencakup persepsi merek, kepercayaan konsumen, perdagangan internasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Perlindungan hak merek juga membawa tantangan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait penggunaan merek tanpa izin atau pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar (Hasyim, Farida. 2009).

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak merek yang terdaftar secara resmi. UU Merek Indonesia menetapkan bahwa perlindungan hukum baru diberikan saat merek tersebut terdaftar secara sah. Namun, tantangan tetap ada terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi, terutama penggunaan merek tanpa izin (Hasyim, Farida. 2009).

Proses hukum di Pengadilan Niaga berbasis pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memungkinkan pemilik merek untuk menegakkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Keputusan dari proses ini akan memiliki implikasi luas, baik bagi pihak terkait maupun upaya penguatan perlindungan merek di tingkat nasional dan internasional (Maulana, Insan Budi. 1999).

Putusan hukum memengaruhi citra merek dan reputasi, dapat membantu mempertahankan integritas merek di mata konsumen, atau sebaliknya, merusak citra merek. Dampak ekonomi juga signifikan, dengan potensi pengaruh terhadap kestabilan finansial perusahaan. Keterlibatan merek mapan seperti Geprek Bensu membawa implikasi terhadap keuangan perusahaan, terutama jika sanksi finansial besar dikenakan (Maulana, Insan Budi. 1999).

Kejelasan aturan dalam putusan hukum juga memengaruhi praktik bisnis dan dapat memberikan pedoman yang lebih tepat bagi pelaku usaha di industri. Namun, putusan yang ambigu atau tidak memberikan kejelasan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat inovasi dan pertumbuhan industri (Maulana, Insan Budi. 1999).

Implikasi terhadap regulasi juga menjadi perhatian, di mana putusan hukum yang mengikat dapat memicu perubahan atau penyempurnaan regulasi terkait hak kekayaan intelektual di industri kuliner dan hiburan. Revisi peraturan mungkin diperlukan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih kuat dan jelas dalam melindungi hak cipta dan hak merek di tengah dinamika industri yang terus berkembang (Maulana, Insan Budi. 1999).

Keseluruhan, putusan hukum dalam kasus ini akan membentuk standar dan arah bagi industri kuliner dan hiburan di masa mendatang, memengaruhi berbagai aspek dari hukum dan ekonomi hingga citra merek, praktik bisnis, dan regulasi. Implikasi ini tidak hanya terbatas pada pihak yang bersengketa, melainkan mencakup seluruh ekosistem industri dan masyarakat secara luas.

Tantangan dan Adaptasi di Era Globalisasi

Tantangan dan adaptasi dalam era globalisasi menjadi fokus utama dalam memahami konteks hak kekayaan intelektual, khususnya dalam kasus perselisihan antara Geprek Bensu dan Ruben Onsu. Perubahan substansial dalam struktur industri, terutama di sektor kuliner dan hiburan, muncul sebagai hasil dari transformasi pola bisnis yang dipicu oleh akses lebih luas terhadap informasi dan pasar global. Persaingan semakin intens dengan eksposur yang lebih besar terhadap produk dan merek, menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta dan merek dagang, terutama dalam kasus kesamaan atau konflik nama merek (Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013).

Dampak globalisasi membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sistem pendaftaran merek internasional, seperti protokol Madrid, menjadi mekanisme vital dalam melindungi merek nasional di tingkat internasional, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka secara mudah dan ekonomis di luar negeri.

Perlindungan merek juga melibatkan pengakuan terhadap jenis merek nontradisional, seperti suara, tiga dimensi, dan hologram, yang kini termasuk dalam cakupan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Revisi

dalam prosedur pendaftaran merek bertujuan memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mengurus pendaftaran merek mereka (Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013).

Merek, sebagai representasi produk, bukan hanya hasil karya tetapi juga simbol upaya intelektual manusia yang memerlukan pengorbanan signifikan. Merek menjadi aset berharga secara komersial, seringkali bernilai lebih tinggi daripada nilai perusahaan itu sendiri (Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013).

Perlindungan merek melibatkan bukan hanya aspek regulasi semata, tetapi juga perlunya pemahaman masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Proses pendaftaran merek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menjadi krusial untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap merek dagang, melibatkan pemilik merek, produsen, dan pedagang (Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013).

Putusan pengadilan terkait merek "BENSU" antara Geprek Benu dan Ruben Onsu menggambarkan konflik dalam penerapan aturan hak merek. Keputusan ini memunculkan perbedaan interpretasi undang-undang, terutama terkait prinsip pendaftaran pertama yang memberikan hak eksklusif kepada pendaftar pertama atas merek tersebut. Klarifikasi hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan yang adil dan seimbang dalam industri kuliner dan hiburan (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Adaptasi menjadi kunci menghadapi tantangan ini, terutama bagi pelaku usaha seperti Geprek Benu dan Ruben Onsu. Mereka harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tuntutan konsumen yang semakin dinamis. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual menjadi krusial di tengah persaingan yang semakin sengit (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Pengusaha di industri ini perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan perubahan teknologi dan model bisnis baru yang muncul akibat globalisasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mengelola dan memperluas merek dagang, tetapi risiko pelanggaran hak cipta atau merek secara online juga harus dipertimbangkan (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Peraturan hukum terkait hak kekayaan intelektual harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketidakselarasan antara kemajuan teknologi dan evolusi hukum menciptakan ketertinggalan dalam regulasi yang berlaku. Harmonisasi antara perlindungan hak cipta dan merek dengan inovasi dan perkembangan baru di industri kuliner dan hiburan menjadi penting (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Perselisihan antara Geprek Benu dan Ruben Onsu mengenai merek "BENSU" menyoroti kompleksitas sistem First to File dalam hak merek Indonesia. Prinsip ini memberikan keunggulan kepada pendaftar pertama, tetapi pengadilan mempertimbangkan aspek lain seperti penggunaan merek dan keberlanjutan hak tersebut. Perdebatan terkait interpretasi hukum dan konsistensi penegakan hukum menunjukkan perlunya revisi aturan dan sistem hak merek di Indonesia (Hanif Febiansyah dan Retno Susilowati, 2023).

Merek sebagai identitas produk memainkan peran vital dalam mempertahankan reputasi perusahaan di pasar. Perlindungan hukum terhadap merek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, penting untuk mencegah praktik tidak jujur dalam persaingan bisnis dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek (Arfi Dyah Chatarina, 2019).

Perselisihan merek "BENSU" menunjukkan konflik antara prinsip First to File dengan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor-faktor lain. Kejelasan hukum, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan harmonisasi regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas merek dan hak cipta di era globalisasi yang dinamis.

Upaya Harmonisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Upaya harmonisasi menjadi krusial dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), terutama dalam kasus kontroversial seperti Geprek Benu dan Ruben Onsu. Perlindungan hak cipta dan merek di industri kuliner dan hiburan harus selaras dengan standar yang konsisten, mengingat dinamika perkembangan teknologi dan bisnis global saat ini (Marselinus Manik, 2019).

Kejelasan hukum menjadi fokus dalam diskusi seputar HKI, karena menentukan tata cara berlakunya aturan yang melibatkan perlindungan terhadap karya intelektual. Aturan hukum yang lebih pasti dan adil memastikan efektivitas fungsi hukum, melibatkan perancangan aturan yang mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga, juri, dan pemerintahan (Marselinus Manik, 2019).

Kejelasan hukum bukan hanya mengenai ketentuan dalam peraturan yang ada, tetapi juga mencakup kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi hukum. Registrasi merek memberikan kepastian hukum kepada pemegang merek, memastikan hak eksklusif terhadap merek yang didaftarkan secara resmi (Marselinus Manik, 2019; Shellen Dhea Af Gaumi, 2020).

Sistem registrasi merek "first to file" di Indonesia mendukung kejelasan hukum dan mencegah konflik merek di masa mendatang. Harmonisasi HKI melibatkan kerjasama internasional, mengatasi perbedaan regulasi antar negara untuk memastikan perlindungan yang adil (Heniyatun et al., 2020).

Harmonisasi HKI juga melibatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual. Pendidikan dan sosialisasi mengenai perlindungan hak cipta dan merek dagang perlu ditingkatkan, menciptakan masyarakat yang lebih patuh terhadap regulasi dan melindungi karya kreatif serta inovasi di sektor kuliner dan hiburan (Arif, 2018).

Perlu ditekankan bahwa harmonisasi HKI tidak hanya mengenai regulasi, tetapi juga tentang kejelasan hukum dan kesamarataan dalam pemberian proteksi. Fokus pada kejelasan hukum harus seimbang dengan kesamarataan dan kemanfaatan aturan bagi masyarakat secara umum (Windiantina et al., 2022).

Di Indonesia, sistem registrasi merek "first to file" menjaga kepastian hukum dan kesamarataan, memastikan pemilik terdaftar memiliki kekuasaan atas merek. Harmonisasi perlindungan HKI dalam kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu memerlukan pendekatan terkoordinasi antara pemerintah, lembaga hukum, industri, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini merinci kompleksitas perlindungan hak cipta dalam industri kuliner dan hiburan dengan menyoroti kasus Geprek Benu dan Ruben Onsu. Pengaturan merek dagang, hak identitas pribadi, dan kreativitas memunculkan pertentangan antara hak merek dan kepemilikan nama. Dalam era teknologi, peran penting dimainkan oleh teknologi informasi dan platform digital, meskipun membawa tantangan baru terkait penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Kelebihan utama penelitian adalah pemahaman mendalam terhadap aspek hukum dalam penyelesaian sengketa. Namun, tantangan signifikan terletak pada menegakkan batasan antara identitas pribadi, merek dagang, dan hak cipta, terutama dalam situasi tumpang tindih. Kekurangan penelitian termasuk kompleksitas merumuskan aturan hukum hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Menyesuaikan hukum hak cipta dengan tren industri dan inovasi teknologi menjadi tantangan nyata. Kerjasama lintas sektor, melibatkan pemerintah, bisnis, dan komunitas hukum, diperlukan untuk memperjelas aturan dan memperkuat kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Pendekatan holistik dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi menjadi penting, sambil mengembangkan sistem yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia digital. Keseluruhan, upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman, merevisi kebijakan, dan meningkatkan penegakan hukum dapat membawa perlindungan hak kekayaan intelektual ke tingkat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl Raya Gandul, M., & Barat Indonesia, J. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.
- Arfi Dyah Chatarina. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif.

- Arif, M. (2018). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 98–104. [Http://Jurnal.Unimed.Ac.Id/2012/Index.Php/Geo](http://Jurnal.Unimed.Ac.Id/2012/Index.Php/Geo)
- Chosyali, A. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>
- Hakim, G., Samuel Onsu, R., & Ayam Geprek Benny Sujono, P. (2022). Analisis Hukum Kepemilikan Merek Geprek Benu Antara Beny Sujono Dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 576 K/Pdt.Sus-Hki/2020) (Vol. 4).
- Halomoan, K., Lie, G., Rizqy, M., & Putra, S. (2023). Legal Analysis Of Trademark Patent Dispute I Am Geprek Benu Against Geprek Benu. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1).
- Hanif Febiansyah Dan Retno Susilowati. (2023). Analisis Yuridis Sengketa Hak Merek Antara Ayam Geprek Benu Dan Pt. Ayam Geprek Benny Sujono. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, 2.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., Iswanto, B. T., Asiyah, Y., & Praja, C. B. E. (2020). Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal. *Borobudur Law Review*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.31603/Burrev.4648>
- Jannah, M. P., Jannah, M., & Dosen Pengampu Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual Stih Labuhanbatu, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia Oleh. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 06(02).
- Marselinus Manik, M. S. R. N. (2019). Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Ni. Marselinus Manik, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, 08, 1–10.
- Merrill, J. N., & John Merrill Foundation. (2018). *Day Pilgrimage Walks To Cambridgeshire's Cathedrals* (Vol. 06).
- Onsu, R., Court, S., No, D., & Hakim, G. (2022). Analisis Hukum Kepemilikan Merek Geprek Benu Antara Beny Sujono Dan Ruben Onsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 576 K / Pdt . Sus-Hki / 2020) *Legal Analysis Of Ownership Of The Geprek Benu Mark Between Beny Sujono And*. 4(1), 32–50.
- Penelitian Hukum De Jure, J., & Simatupang Peneliti Pada Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Peneitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Jalan Hr Rasuna, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity*). 17(2), 30–35.
- Sardana, L., & Disurya, R. (N.D.). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen.
- Shellen Dhea Af Gaumi, R. H. (2020). Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT).
- Windiantina, W. W., Made Dermawan, I., & Irianti Permanasari, D. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).